

**DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP KONDISI SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI UTARA
(KASUS PADA PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY)**

Rexy Permana Lalenda
NPP. 32.0868

Asdaf Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: rexyalenda01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The presence of the nickel mining industry in North Morowali Regency, particularly operated by PT Gunbuster Nickel Industry, has brought significant changes to the lives of surrounding communities. This mining activity not only impacts income growth and job creation but also causes complex social and economic dynamics. **Purpose:** This study aims to examine the impact of nickel mining activities on the socio-economic conditions of communities in North Morowali Regency. **Methods:** This study aims to examine the impact of nickel mining activities on the socio-economic conditions of communities in North Morowali Regency. **Method:** This research employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation at PT Gunbuster Nickel Industry, Bunta Village, North Morowali Regency. Informants were purposively selected, including government officials, company management, workers, and affected community members. Key informants, namely the Head of the Environmental Service and the Operational Manager of PT GNI, were chosen for their strategic understanding of technical mining aspects and environmental policies directly affecting the community. Data were analyzed inductively through data reduction, presentation, and conclusion drawing to gain a deep and contextual understanding of the socio-economic and environmental impacts of nickel mining activities. **Results/Findings:** The study reveals that PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) significantly impacts six main dimensions of community life: increased income, a shift in economic structure from primary to industrial and service sectors, increased absorption of local labor, changes in community health due to environmental pollution, diverse community perceptions of the mining industry, and a rise in population due to in-migration of workers from outside areas. On the other hand, issues such as worker conflicts, social inequality, and environmental degradation also emerged. The North Morowali Regency Government has undertaken several efforts, including conflict mediation facilitation, regulatory strengthening, and collaboration on community empowerment programs. **Conclusion:** This study shows that nickel mining activities by PT Gunbuster Nickel Industry have significant effects on the socio-economic conditions of North Morowali Regency's communities, with increased income and employment opportunities, but also challenges such as social conflicts and environmental impacts that require serious attention from the government and related stakeholders.

Keywords: Nickel Mining, Socio-Economics, PT. GNI, North Morowali, Industrial Impact

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberadaan industri pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara, khususnya yang dijalankan oleh PT. Gunbuster Nickel Industry, telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Aktivitas pertambangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di PT Gunbuster Nickel Industry, Desa Bunta, Kabupaten Morowali Utara. Informan dipilih secara purposive meliputi pejabat pemerintah, manajemen perusahaan, pekerja, dan masyarakat terdampak. Informan kunci, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Manajer Operasional PT GNI, dipilih karena memiliki pemahaman strategis mengenai aspek teknis pertambangan dan kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Data dianalisis secara induktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami dampak sosial ekonomi dan lingkungan aktivitas pertambangan nikel secara mendalam dan kontekstual. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) memberikan dampak signifikan pada enam dimensi utama kehidupan masyarakat: peningkatan pendapatan, pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke industri dan jasa, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, perubahan kondisi kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan, munculnya persepsi beragam dari masyarakat terhadap industri tambang, serta meningkatnya jumlah penduduk akibat arus migrasi pekerja dari luar daerah. Di sisi lain, muncul pula persoalan seperti konflik antar pekerja, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan beberapa upaya seperti fasilitasi mediasi konflik, penguatan regulasi, serta kolaborasi program pemberdayaan masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gunbuster Nickel Industry memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Morowali Utara, dengan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, namun juga menimbulkan tantangan berupa konflik sosial dan dampak lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Kata Kunci: Pertambangan Nikel, Sosial Ekonomi, PT. GNI, Morowali Utara, Dampak Industri

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia dengan aktivitas pertambangan yang masif dan berkontribusi besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022. Fenomena ini sesuai dengan temuan Azapagic (2004) yang menegaskan pentingnya kerangka pembangunan berkelanjutan dalam mengelola dampak ekonomi dan lingkungan dari industri pertambangan. Morowali Utara, dengan potensi nikel yang besar, membutuhkan pengelolaan berorientasi keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak pertambangan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga kompleks di bidang sosial dan

lingkungan (Di Noi & Ciroth, 2018; Betancur-Corredor et al., 2018; Mestanza-Ramón et al., 2022). Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan kerusakan ekosistem yang ditemukan di Morowali Utara konsisten dengan studi Dudka dan Adriano (1997) serta Kossoff et al. (2014) yang menyoroti pencemaran dan risiko kegagalan pengelolaan limbah tambang. Penggunaan teknologi pemetaan lingkungan yang direkomendasikan oleh Rudke et al. (2020) dapat menjadi solusi untuk memantau kerusakan tersebut secara lebih efektif. Dari sisi sosial, pergeseran mata pencaharian masyarakat dari pertanian dan perikanan ke sektor pertambangan di Morowali Utara memicu berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan ekonomi, konflik lahan, dan meningkatnya urbanisasi, sebagaimana diuraikan oleh Hajkowicz et al. (2011) dan Mwakesi et al. (2020). Selain itu, penelitian Esteves et al. (2017) dan Horowitz et al. (2018) menegaskan pentingnya penilaian dampak sosial yang sensitif terhadap hak asasi manusia dan nilai budaya masyarakat adat yang kerap terdampak oleh aktivitas pertambangan, kondisi yang juga ditemukan di wilayah penelitian ini. Konflik sosial yang terjadi akibat distribusi manfaat yang tidak merata dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan selaras dengan temuan Owen dan Kemp (2013) serta Prno dan Slocombe (2012), yang menggarisbawahi pentingnya legitimasi sosial dan tata kelola yang inklusif untuk menjaga harmonisasi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Hal ini juga didukung oleh studi Frederiksen (2018, 2019) yang menekankan peran strategis CSR yang adaptif dan partisipatif, yang masih menjadi tantangan di Morowali Utara, di mana implementasi CSR belum mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga menimbulkan resistensi sosial. Lebih lanjut, penelitian Smith et al. (2012), Petkova et al. (2009), dan Kaligis et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan tambang sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini sangat relevan dengan situasi di Morowali Utara yang mengalami pergeseran sosial dan risiko disintegrasi komunitas akibat aktivitas pertambangan. Akhirnya, Liu et al. (2020) mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan industri ekstraktif seperti pertambangan harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan keberlanjutan dan keadilan sosial. Ini memperkuat urgensi perlunya kebijakan pembangunan di Morowali Utara yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengintegrasian temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu ini menguatkan pentingnya kajian mendalam mengenai dampak pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara, yang akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang holistik dan berkeadilan sosial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia dan sektor pertambangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kenyataannya manfaat ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal. Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian dan perikanan ke pertambangan menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, konflik lahan, serta urbanisasi yang belum mendapat penanganan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan dengan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Berbagai penelitian terdahulu (Hajkowicz et al., 2011; Mwakesi et al., 2020) menegaskan bahwa pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun seringkali juga menimbulkan ketimpangan sosial yang perlu dikelola secara hati-hati. Di Morowali Utara, ketimpangan ini diperparah oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan, serta kurang efektifnya peran pemerintah daerah sebagai mediator konflik, seperti yang disoroti oleh Owen dan Kemp (2013)

serta Prno dan Slocombe (2012). Dari sisi lingkungan, meskipun ada kerangka pengelolaan berkelanjutan yang telah dikembangkan (Azapagic, 2004; Di Noi & Ciroth, 2018), kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Morowali Utara masih sangat nyata, terutama dalam hal pencemaran air dan udara serta kerusakan ekosistem. Lemahnya regulasi dan pengawasan lingkungan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap sumber penghidupan masyarakat dan kesehatan lingkungan sekitar, sebagaimana juga ditemukan oleh Dudka dan Adriano (1997) serta Kossoff et al. (2014). Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di daerah ini pun belum optimal, karena kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sehingga menimbulkan resistensi sosial dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata komunitas (Frederiksen, 2018; Frederiksen, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan CSR sebagai instrumen pembangunan sosial dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, keterbatasan pemberdayaan masyarakat lokal dan minimnya transparansi dalam pengelolaan pertambangan memperburuk ketegangan sosial dan disintegrasi komunitas, yang seharusnya bisa diatasi melalui pendekatan partisipatif dan inklusif seperti yang dianjurkan oleh Smith et al. (2012) dan Kaligis et al. (2021). Terakhir, integrasi antara kebijakan pengelolaan tambang di tingkat lokal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global masih kurang diperhatikan, sehingga menimbulkan tantangan dalam menerapkan praktik pertambangan yang adil dan ramah lingkungan secara menyeluruh (Liu et al., 2020). Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik pengelolaan pertambangan berkelanjutan dengan kondisi nyata di Morowali Utara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada tata kelola sosial yang inklusif, efektivitas CSR yang partisipatif, pengelolaan dampak lingkungan yang lebih ketat, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai pembangunan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Morowali Utara.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Azapagic (2004) mengembangkan kerangka indikator pembangunan berkelanjutan yang khusus dirancang untuk industri pertambangan dan mineral. Kerangka ini memungkinkan pengukuran dampak secara komprehensif, sehingga perusahaan dapat mengelola proses pertambangan dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini penting mengingat tekanan lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan, sebagaimana disorot oleh Di Noi dan Ciroth (2018), yang mengidentifikasi titik-titik kritis (hotspots) keberlanjutan dalam operasi tambang yang memerlukan perhatian serius. Betancur-Corredor et al. (2018) meneliti pertambangan emas di Kolombia dan menemukan bahwa pertambangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan yang harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan. Kajian serupa dilakukan oleh Mestanza-Ramón et al. (2022) yang membahas dampak sejarah, sosial ekonomi, dan lingkungan pertambangan emas di wilayah Andean Ekuador, menggarisbawahi masalah keberlanjutan yang dihadapi komunitas lokal akibat aktivitas pertambangan. Aspek dampak lingkungan dari penambangan juga banyak menjadi perhatian. Dudka dan Adriano (1997) menyajikan tinjauan menyeluruh mengenai pencemaran tanah dan air serta risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pengolahan logam. Kossoff et al. (2014) menyoroti karakteristik bendungan limbah tambang, kegagalannya, serta dampak lingkungan yang berpotensi besar, dan mengusulkan metode remediasi yang efektif. Sementara itu, Rudke et al. (2020) menggunakan teknologi GIS dan citra satelit untuk menilai dampak aktivitas pertambangan pada kawasan perlindungan lingkungan di Amazon, menunjukkan tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan. Dampak sosial dari pertambangan juga menjadi fokus penelitian. Esteves et al. (2017) mengemukakan perlunya adaptasi penilaian dampak sosial

yang lebih peka terhadap risiko hak asasi manusia dalam proyek tambang. Horowitz et al. (2018) memperluas perspektif ini dengan meninjau hubungan masyarakat adat dengan proyek pertambangan besar dalam konteks post/colonial, menekankan perlunya pendekatan multidisipliner yang sensitif terhadap nilai budaya dan sejarah. Scheyvens dan Lagisa (1998) menyoroti khususnya dampak pertambangan dan penebangan hutan terhadap perempuan di wilayah Pasifik, yang mengalami disempowerment sekaligus menunjukkan bentuk perlawanan sosial. Dari segi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, Hajkowicz et al. (2011) meneliti dampak pertambangan di berbagai wilayah di Australia dan menemukan bahwa meskipun pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ketimpangan sosial sering kali muncul sebagai konsekuensi. Mwakesi et al. (2020) juga menemukan bahwa pertambangan di Kenya berdampak signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal, baik secara negatif maupun positif, sehingga perlunya strategi mitigasi dampak yang tepat. Isu tata kelola dan legitimasi sosial dalam industri pertambangan menjadi perhatian penting dalam literatur. Owen dan Kemp (2013) serta Prno dan Slocombe (2012) mengkaji konsep *social license to operate* (izin sosial untuk beroperasi), yang bukan sekadar legalitas formal tetapi juga melibatkan hubungan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap perusahaan tambang. Frederiksen (2018, 2019) menambah dimensi ini dengan menghubungkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan risiko dan kondisi politik di negara berkembang, yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program CSR dan pembangunan berkelanjutan. Peran komunitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan industri pertambangan juga menjadi titik fokus penting. Smith et al. (2012) menunjukkan tantangan dalam representasi komunitas dalam Extractive Industries Transparency Initiative di Madagaskar, yang berdampak pada efektivitas transparansi dan akuntabilitas pertambangan. Petkova et al. (2009) melalui studi kasus di Bowen Basin, Australia, mengungkapkan bagaimana pengembangan pertambangan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat secara langsung, sekaligus menimbulkan konflik dan kebutuhan akan strategi partisipasi yang inklusif. Selain itu, Kaligis et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program seperti Gerakan Desa Ikut Sejahtera dapat menjadi model positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan. Sementara itu, Liu et al. (2020) menekankan tanggung jawab global bersama dalam produksi industri ekstraktif seperti besi dan baja, yang sering kali berhubungan erat dengan kegiatan pertambangan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menegaskan bahwa industri pertambangan memiliki peranan strategis dalam pembangunan, tetapi juga membawa risiko dan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang holistik, melibatkan aspek keberlanjutan, tata kelola yang baik, keterlibatan masyarakat, serta mitigasi dampak sosial dan lingkungan agar manfaat pertambangan dapat dirasakan secara adil dan lestari.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan melakukan kajian holistik dan multidimensional terhadap dampak industri pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memfokuskan pada satu aspek tertentu — seperti dampak lingkungan atau kesejahteraan ekonomi secara terpisah — penelitian ini menelaah keterkaitan kompleks antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan ketimpangan sosial, konflik lahan, serta degradasi lingkungan yang terjadi secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas tata kelola sosial dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif sebagai alat mitigasi konflik dan pemberdayaan masyarakat lokal, yang selama ini kurang mendapat perhatian mendalam dalam konteks wilayah tambang nikel di Indonesia. Pendekatan partisipatif ini merupakan aspek inovatif yang berkontribusi pada pengembangan model pengelolaan pertambangan yang inklusif dan

berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pemerintah daerah dan pelaku industri. Penelitian ini juga mengadopsi penggunaan metode integratif dalam memetakan dan menganalisis dampak lingkungan dengan memanfaatkan data lapangan dan teknologi pemantauan lingkungan, yang jarang diterapkan secara terpadu dalam kajian pertambangan di wilayah ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan kajian empiris terkait interaksi sosial-ekonomi-lingkungan pada industri pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah fokus pada konteks lokal yang spesifik, yaitu Morowali Utara, dengan karakteristik sosial budaya masyarakat adat dan dinamika ekonomi lokal yang unik, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi studi pengelolaan sumber daya mineral di wilayah lain dengan kondisi serupa. Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan kerangka kerja baru yang dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan dan praktik pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan yang berkeadilan. Penelitian terdahulu telah banyak menunjukkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Azapagic (2004) mengembangkan kerangka indikator pembangunan berkelanjutan untuk industri pertambangan yang penting sebagai alat ukur dampak komprehensif, sejalan dengan kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan. Di Noi dan Ciroth (2018) menyoroti titik kritis keberlanjutan yang harus menjadi perhatian serius dalam operasi tambang, menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam mitigasi dampak. Studi Betancur-Corredor et al. (2018) dan Mestanza-Ramón et al. (2022) memperlihatkan bahwa meskipun pertambangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi, tantangan sosial dan lingkungan yang muncul memerlukan strategi pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Aspek dampak lingkungan yang diangkat oleh Dudka dan Adriano (1997), Kossoff et al. (2014), dan Rudke et al. (2020) menegaskan perlunya teknologi dan metode pemantauan yang akurat untuk mengendalikan risiko pencemaran dan degradasi lingkungan. Dari sisi sosial, Esteves et al. (2017), Horowitz et al. (2018), dan Scheyvens dan Lagisa (1998) menekankan pentingnya pendekatan sosial yang sensitif terhadap hak asasi manusia, nilai budaya, dan pemberdayaan kelompok rentan, yang selama ini sering kurang diperhatikan. Studi Hajkowicz et al. (2011) dan Mwakesi et al. (2020) juga menegaskan bahwa dampak pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat ganda, dengan ketimpangan sosial yang tetap menjadi masalah utama. Isu tata kelola dan legitimasi sosial, yang dikaji oleh Owen dan Kemp (2013), Prno dan Slocombe (2012), serta Frederiksen (2018, 2019), memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pertambangan sangat bergantung pada kepercayaan dan penerimaan masyarakat, yang sejalan dengan fokus penelitian ini pada CSR partisipatif dan penguatan tata kelola sosial. Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas sebagai strategi mitigasi konflik juga telah diangkat oleh Smith et al. (2012), Petkova et al. (2009), dan **Kaligis et al. (2021)**, namun masih jarang diterapkan secara komprehensif pada konteks pertambangan nikel di Indonesia, sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi tetapi juga memperluas pemahaman akademik dan praktis mengenai pengelolaan dampak industri pertambangan melalui pendekatan multidimensional dan partisipatif yang belum banyak dilakukan di konteks lokal Morowali Utara, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam dampak sosial ekonomi dari keberadaan industri pertambangan nikel terhadap masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana aktivitas pertambangan nikel memengaruhi perubahan dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat lokal, baik dari sisi mata pencaharian, kondisi ekonomi keluarga, relasi sosial, maupun keberlanjutan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

II METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada makna dan pemahaman realitas sosial yang kompleks, serta interaksi antara masyarakat dan aktivitas tambang dalam konteks alamiah tanpa manipulasi variabel. Sebagaimana dijelaskan oleh (Nurdin & Hartati, 2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan pada proses eksplorasi dan penafsiran terhadap fenomena yang terjadi secara holistik dan kontekstual. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori dampak sosial ekonomi dari (Suratmo, 2021), yang menekankan bagaimana aktivitas ekonomi seperti pertambangan dapat mempengaruhi aspek pendapatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Teori ini dipilih karena relevan dengan konteks penelitian yang fokus pada hubungan timbal balik antara aktivitas industri dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan interaksi dengan para informan yang dipilih secara purposive (Simangunsong, 2017). Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintah daerah seperti Wakil Bupati Morowali Utara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala desa Bunta, manajer dan pekerja di PT. GNI (industri pertambangan nikel), serta masyarakat sekitar desa Bunta yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Informan penelitian terdiri dari beberapa pihak penting, yakni Wakil Bupati Morowali Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara sebagai informan kunci, Kepala Desa Bunta, Manajer Operasional PT. GNI, pekerja di PT. GNI, dan masyarakat sekitar Desa Bunta. Informan kunci dipilih berdasarkan kedalaman pengetahuan dan perannya dalam konteks pertambangan dan dampaknya. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Manajer Operasional PT. GNI, karena keduanya memiliki pemahaman strategis tentang aspek teknis pertambangan dan kebijakan lingkungan yang memengaruhi masyarakat, serta dapat memberikan data valid terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial ekonomi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, alat observasi, catatan lapangan, serta alat perekam suara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menafsirkan data dengan dibantu instrumen pendukung tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi bertujuan mengamati kondisi nyata di lapangan, baik secara fisik maupun sosial, untuk mendapatkan gambaran langsung tentang lingkungan dan interaksi masyarakat dengan tambang. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap dampak pertambangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi dan laporan terkait yang mendukung validitas data lapangan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal bulan Januari tahun 2025 di industri pertambangan nikel PT. GNI yang berlokasi di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan waktu dan lokasi penelitian ini didasarkan pada aksesibilitas lapangan serta relevansi dengan fokus penelitian tentang dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif secara induktif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara. Pendekatan ini

memungkinkan penelitian menggali makna dan pola yang muncul secara kontekstual sesuai kondisi lapangan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus Pada PT.Gunbuster Nickel Industry)

1. Dampak Pada Pendapatan Masyarakat

Hadirnya industri pertambangan di Kabupaten Morowali Utara memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Industri pertambangan, khususnya sektor pengolahan nikel yang dikelola oleh PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi warga di daerah ini. Dampak positif yang paling nyata dirasakan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pertambangan. Peningkatan pendapatan ini dapat dilihat dari tren pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Morowali Utara yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. PDRB per kapita yang terus meningkat mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi besar di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja langsung di tambang, tetapi juga merembet ke sektor-sektor pendukung lain seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan jasa, yang mengalami perkembangan pesat akibat meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan industri pertambangan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat lokal. Sebelum hadirnya industri pertambangan, sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja terbatas. Namun dengan adanya industri pertambangan, banyak masyarakat terutama generasi muda yang memperoleh kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat secara umum. Perubahan ini menandai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Morowali Utara dari yang sebelumnya lebih dominan pada sektor primer menjadi lebih beragam dengan berkembangnya sektor sekunder dan tersier. Proses industrialisasi dan modernisasi ini menciptakan berbagai peluang usaha baru dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

a. Penghasilan Masyarakat Meningkat

Kehadiran PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara telah membawa pengaruh positif yang nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Industri pertambangan yang dikelola PT GNI ini berhasil membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar, dengan tingkat gaji yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Kesempatan kerja yang luas dan pendapatan yang stabil memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak hanya pekerja tambang yang merasakan manfaat langsung, aktivitas industri yang berkembang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro dan kecil. Usaha seperti warung makan, jasa transportasi, dan penyediaan hunian mulai tumbuh pesat di sekitar area operasional perusahaan. Hal ini menciptakan efek berantai yang memperkuat ekonomi lokal dan menambah penghasilan para pelaku usaha tersebut. Dengan demikian, PT GNI bukan hanya berdampak pada pekerja langsung, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Indikator yang relevan untuk mengukur perubahan kesejahteraan masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang menunjukkan rata-rata pendapatan ekonomi per individu di wilayah

tersebut. Data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara mencerminkan tren peningkatan signifikan pada PDRB per kapita selama periode 2019 hingga 2024. Terlihat bahwa nilai PDRB per kapita meningkat dari sekitar Rp86 juta di tahun 2019 menjadi lebih dari Rp201 juta pada tahun 2024. Lonjakan ini sangat berkaitan dengan ekspansi industri pertambangan dan aktivitas hilirisasi nikel yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Gaji Pekerja Tambang

Sistem penggajian yang diterapkan PT GNI menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kompensasi yang kompetitif sesuai dengan jenjang jabatan dan tanggung jawab karyawan. Gaji pekerja di berbagai posisi, mulai dari operator alat berat, teknisi, hingga level manajerial, berada pada kisaran yang mampu memberikan kehidupan layak. Selain gaji pokok, berbagai tunjangan seperti makan, transportasi, kesehatan, dan insentif lembur turut menambah nilai total penghasilan karyawan. Tingkat remunerasi ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat lokal yang sebelumnya bekerja di sektor informal atau pertanian untuk beralih bekerja di industri pertambangan. Gaji yang stabil dan lebih tinggi memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik serta meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan adanya penghasilan tetap, pekerja dan keluarganya dapat merencanakan masa depan lebih matang, termasuk investasi pendidikan dan kesehatan.

c. Beban Keluarga

Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di PT GNI memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi rumah tangga di wilayah sekitar perusahaan. Sebelumnya, banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seringkali harus berutang atau mengandalkan bantuan pihak lain. Namun dengan penghasilan yang lebih stabil dari pekerjaan di tambang, beban ekonomi keluarga berkurang secara signifikan. Peningkatan kesejahteraan ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara lebih layak, termasuk pangan, pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Kondisi ekonomi yang membaik juga berdampak positif pada aspek psikologis dan sosial dalam keluarga. Orang tua merasa lebih tenang dan tidak terbebani secara berlebihan, sementara anak-anak dapat fokus pada pendidikan tanpa perlu membantu mencari nafkah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, masyarakat kini memiliki peluang untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, seperti menabung, memperbaiki tempat tinggal, hingga memulai usaha mandiri. Dengan demikian, PT GNI berperan tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja tetapi juga sebagai penggerak penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

2. Dampak Pada Perkembangan Struktur Ekonomi Masyarakat

Keberadaan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi daerah tersebut. Sebelum hadirnya industri pertambangan ini, perekonomian lokal sangat bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Namun, dengan berkembangnya industri pertambangan dan pengolahan nikel, terjadi transformasi ekonomi yang mencolok, di mana sektor pertambangan dan industri pengolahan mulai mengambil peran sentral sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi struktur ekonomi ini tidak hanya berdampak pada munculnya lapangan pekerjaan baru yang lebih beragam, tetapi juga merangsang perkembangan sektor perdagangan

dan jasa yang sebelumnya kurang berkembang. Usaha mikro dan kecil seperti warung makan, jasa transportasi, penyediaan hunian, hingga bengkel mulai tumbuh pesat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang meningkat di sekitar wilayah operasi PT GNI. Dengan demikian, diversifikasi sektor ekonomi ini memperkaya basis ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian semata. Selain itu, kehadiran industri pertambangan juga memacu pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, fasilitas transportasi, dan perumahan yang berperan dalam mempercepat integrasi dan konektivitas ekonomi di Kabupaten Morowali Utara. Peningkatan infrastruktur ini secara langsung mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat serta memudahkan akses pasar bagi produk-produk lokal.

a. Diversifikasi Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Morowali Utara

Sebelum hadirnya industri pertambangan, struktur ekonomi Kabupaten Morowali Utara sangat didominasi oleh sektor primer, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran yang cukup signifikan ke sektor sekunder dan tersier, yang merupakan indikator proses transformasi struktural ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas pertambangan nikel telah mendorong pertumbuhan pesat sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan nikel yang menjadi komoditas unggulan daerah. Menurut data yang diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalan menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 43,14%. Sektor industri pengolahan menyusul dengan kontribusi sebesar 24,22%, menunjukkan lonjakan signifikan seiring berkembangnya fasilitas pengolahan nikel di wilayah tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya mendominasi kini memberikan kontribusi sebesar 17%, sementara sektor konstruksi dan perdagangan turut berperan masing-masing sebesar 9,12% dan 5,03%. Peningkatan kontribusi sektor konstruksi dan perdagangan ini mencerminkan perluasan aktivitas ekonomi pendukung industri pertambangan dan pengolahan. Tabel PDRB Kabupaten Morowali Utara berdasarkan harga konstan tahun 2010 dari tahun 2020 hingga 2023 juga mengonfirmasi tren positif tersebut. Nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalan mengalami peningkatan pesat, dari Rp3,298 triliun pada 2020 menjadi Rp6,459 triliun pada 2023. Sektor industri pengolahan bahkan menunjukkan lonjakan yang lebih dramatis, dari Rp155 miliar pada 2020 menjadi hampir Rp2,963 triliun pada 2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif stabil, dengan pertumbuhan yang lebih moderat dari Rp2,452 triliun menjadi Rp2,704 triliun dalam periode yang sama. Sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang stabil, menunjang aktivitas pembangunan infrastruktur yang mendukung industri utama di daerah tersebut.

Pertumbuhan sektor-sektor ini tidak hanya meningkatkan kontribusi ekonomi daerah, tetapi juga secara langsung menciptakan peluang kerja yang beragam bagi masyarakat lokal. Dengan aktivitas tambang yang intensif, kebutuhan akan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi meluas ke industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya. Investasi dan aktivitas industri memicu pembangunan fasilitas pendukung, seperti kos-kosan dan warung makan, yang juga menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat. Dengan demikian, struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Morowali Utara kini semakin beragam, mencakup berbagai bidang mulai dari pekerja tambang, teknisi industri, tenaga konstruksi, hingga pelaku usaha mikro di sektor perdagangan dan jasa.

Proses diversifikasi ini juga menunjukkan adanya pergeseran ketergantungan ekonomi dari sektor primer ke sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi yang

mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru dan meningkatnya penerimaan daerah dari pajak serta retribusi merupakan tanda bahwa Kabupaten Morowali Utara sedang dalam proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi yang berkelanjutan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali Utara

Data PDRB Kabupaten Morowali Utara pada periode 2020 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama di sektor pertambangan dan industri pengolahan, yang menjadi pilar utama perekonomian daerah. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan nilai yang sangat pesat, dari Rp3,298 triliun pada tahun 2020 naik menjadi Rp6,459 triliun pada tahun 2023. Lonjakan ini menggambarkan dominasi sektor tambang sebagai penggerak utama ekonomi dan sumber pendapatan terbesar daerah. Sektor industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan luar biasa, dari Rp155 miliar pada tahun 2020 menjadi hampir Rp2,963 triliun pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ekspansi pengolahan nikel yang semakin berkembang, memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap perekonomian lokal. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi penting dengan nilai yang relatif stabil dan bertumbuh secara moderat, dari Rp2,452 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,704 triliun pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor tradisional ini masih menjadi penopang ekonomi daerah, meskipun porsinya mulai menurun seiring munculnya sektor baru. Sektor konstruksi juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari Rp1.000 triliun pada 2020 menjadi Rp1.238 triliun pada 2023, yang sejalan dengan aktivitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung industri pertambangan dan pengolahan. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor meningkat dari Rp415 miliar pada 2020 menjadi Rp651 miliar pada 2023, yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi yang lebih hidup. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Morowali Utara tanpa migas meningkat dari Rp8,72 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp16,07 triliun pada tahun 2023. PDRB per kapita juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp52 juta menjadi Rp88 juta, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Pertumbuhan PDRB yang pesat di sektor pertambangan dan industri pengolahan ini sekaligus menandai proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi di Kabupaten Morowali Utara, di mana aktivitas ekonomi semakin terdiversifikasi dan berbasis nilai tambah tinggi.

3. Dampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja

a. Kesempatan Kerja Lebih Besar

Masuknya industri pertambangan di Kabupaten Morowali Utara, khususnya kehadiran PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan masyarakat setempat. Sebelum adanya aktivitas pertambangan, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan yang memiliki kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja yang terbatas. Hal ini menyebabkan kesempatan kerja yang tersedia relatif sedikit sehingga angka pengangguran terselubung cukup tinggi, terutama di kalangan usia produktif. Seiring beroperasinya industri pertambangan dan pengolahan nikel, terjadi peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. PT GNI melaporkan telah menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja langsung meliputi berbagai posisi seperti operator alat berat, teknisi, mekanik, staf logistik, dan tenaga administrasi. Sementara secara tidak langsung, muncul berbagai usaha pendukung seperti warung makan, kos-kosan,

laundry, dan jasa transportasi lokal yang turut membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya di sektor informal dan UMKM. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini berdampak langsung pada menurunnya angka pengangguran di wilayah sekitar. Masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan kini memiliki penghasilan rutin baik sebagai karyawan industri maupun pelaku usaha pendukung.

b. Tingkat Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja

Data statistik ketenagakerjaan Kabupaten Morowali Utara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 68,53% hingga 75,45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif aktif mencari pekerjaan atau bekerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini cenderung rendah, berada pada kisaran 2,23% hingga 3,15%. Terjadinya penurunan TPT pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan perbaikan signifikan dalam penyediaan lapangan kerja, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kehadiran industri pertambangan yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Persentase penduduk yang bekerja juga tetap tinggi pada kisaran 97%, menandakan bahwa mayoritas angkatan kerja yang aktif memperoleh pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja oleh industri pertambangan menjadi faktor utama dalam peningkatan kondisi ketenagakerjaan ini. Dengan demikian, kehadiran PT GNI dan industri pertambangan lainnya telah berkontribusi secara nyata dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas serta menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Morowali Utara.

4. Dampak Pada Kesehatan Masyarakat

a. Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kehadiran industri pertambangan di Kabupaten Morowali Utara, terutama operasional PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), memberikan dampak ganda terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan mereka dalam mengakses layanan kesehatan menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses ke fasilitas medis yang lebih memadai, kemampuan memperoleh asupan gizi yang cukup, serta partisipasi dalam program-program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR), seperti penyediaan klinik kesehatan, penyuluhan, dan perbaikan sanitasi. Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan juga menimbulkan tantangan kesehatan yang signifikan. Kegiatan eksplorasi dan produksi menyebabkan pencemaran udara berupa debu dan polusi yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Selain itu, pencemaran air dari limbah tambang mengancam kualitas sumber air bersih yang biasa digunakan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan peningkatan kasus penyakit yang berhubungan dengan lingkungan, seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), gangguan pencernaan, dan penyakit kulit. Data dari Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 mencatat sepuluh jenis penyakit terbanyak yang diderita masyarakat, yang menunjukkan prevalensi penyakit-penyakit kronis dan infeksi, antara lain hipertensi esensial, gastritis, ISPA, influenza, diabetes melitus, common cold, myalgia, disentri basiler dan amuba, tuberkulosis paru, dan dispepsia. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup secara aktif melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas tambang, dengan mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan melalui dokumen

AMDAL, serta pemantauan rutin kualitas udara, air, dan limbah. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan agar dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

b. Mortalitas

Indikator mortalitas memberikan gambaran penting mengenai kinerja sistem kesehatan dan dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Morowali Utara, angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2020 tercatat sebesar 25,51 per seribu kelahiran hidup, angka kematian balita (U5MR) sebesar 25,92 per seribu, dan angka kematian anak (AKAn) sebesar 5,03 per seribu. Data ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang masih menghadapi tantangan, meskipun telah terjadi perkembangan industri yang diharapkan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Penurunan angka mortalitas dapat menjadi indikator positif dari perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan taraf hidup akibat pertumbuhan ekonomi, namun jika angka mortalitas tetap tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya tekanan lingkungan maupun sosial yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan dan intervensi kesehatan yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi kesehatan penduduk di wilayah industri ini.

c. Status Gizi

Status gizi balita di Kabupaten Morowali Utara masih menunjukkan tantangan yang harus diatasi. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi gizi buruk sebesar 5,8% dan gizi kurang 16,8%, yang berarti hampir 23% balita mengalami asupan gizi yang tidak optimal dan berisiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu. Hanya sekitar 10,7% balita yang memiliki status gizi baik, sementara 24,7% mengalami gizi lebih yang juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti obesitas. Keberadaan industri pertambangan yang meningkatkan pendapatan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan status gizi melalui peningkatan daya beli keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Selain itu, intervensi dari pemerintah dan program penyuluhan kesehatan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian ASI dan nutrisi yang seimbang bagi balita. Dengan demikian, meskipun masih terdapat prevalensi gizi kurang dan buruk, adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan layanan kesehatan dan upaya intervensi gizi secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan kualitas status gizi balita di Kabupaten Morowali Utara ke depannya.

5. Persepsi Masyarakat

a. Penilaian Masyarakat

Penilaian masyarakat terhadap keberadaan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara menunjukkan dualitas persepsi, yakni positif dan negatif. Dari sisi positif, masyarakat merasakan manfaat ekonomi langsung berupa terbukanya lapangan kerja bagi penduduk lokal, baik yang memiliki keterampilan maupun yang non-teknis. Selain itu, aktivitas tambang mendorong tumbuhnya usaha kecil di sekitar wilayah, seperti warung makan dan kos-kosan, yang meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas. Namun, di sisi lain, terdapat persepsi negatif yang muncul akibat dampak lingkungan seperti pencemaran udara, gangguan kesehatan akibat debu dan emisi, serta kerugian pada mata pencaharian tradisional nelayan dan petani. Isu keselamatan kerja dan ketimpangan kesempatan kerja antara

tenaga lokal dan tenaga asing juga menjadi bagian dari penilaian negatif masyarakat, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan sosial.

b. Keberpihakan Masyarakat

Keberpihakan masyarakat terhadap PT GNI tercermin melalui dukungan aktif dan penerimaan positif warga sekitar terhadap kehadiran perusahaan. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai program perusahaan seperti pelatihan kerja, kegiatan sosial, dan pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan PT GNI. Banyak warga yang sebelumnya menganggur kini memperoleh pekerjaan langsung di perusahaan maupun membuka usaha pendukung di sekitar tambang. Pernyataan tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang mengapresiasi kontribusi PT GNI menjadi indikator kuat legitimasi sosial dan keberpihakan masyarakat terhadap perusahaan. Keberpihakan ini menjadi modal sosial penting untuk memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat lokal.

6. Dampak Pada Pertumbuhan Penduduk

a. Perubahan Jumlah Penduduk

Kehadiran industri pertambangan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara telah memicu perubahan signifikan dalam dinamika kependudukan wilayah tersebut. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah peningkatan jumlah penduduk secara substansial, yang berasal dari pertumbuhan alami serta migrasi masuk dari berbagai daerah di luar Kabupaten Morowali Utara.

Data statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 128.323 jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 149.757 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan pertumbuhan sekitar 16,8% dalam kurun waktu lima tahun, yang merupakan indikasi kuat bahwa aktivitas industri pertambangan telah menjadi magnet demografis yang menarik arus pendatang baru. Peningkatan jumlah penduduk ini membawa dua sisi dampak yang saling terkait. Dari aspek ekonomi, lonjakan penduduk mendorong berkembangnya sektor usaha pendukung seperti kos-kosan, warung makan, toko kebutuhan harian, dan jasa-jasa lainnya. Hal ini secara tidak langsung mempercepat roda perekonomian lokal serta membuka peluang kerja baru di luar sektor pertambangan. Namun demikian, penambahan penduduk juga menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dasar dan fasilitas umum, seperti ketersediaan perumahan, pasokan air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan yang belum sepenuhnya memadai untuk menampung lonjakan jumlah warga. Secara sosial, perubahan komposisi penduduk yang kini semakin heterogen memunculkan tantangan dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarga. Pendatang yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan adat istiadat berbeda menambah dinamika sosial baru yang harus dikelola dengan pendekatan yang adaptif dan bijaksana. Dampak lingkungan juga menjadi isu penting yang muncul akibat peningkatan kepadatan penduduk. Penggunaan lahan yang lebih intensif, meningkatnya volume limbah rumah tangga dan limbah usaha, serta pembangunan pemukiman baru yang belum selalu terencana secara baik, berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, upaya perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu menjadi sangat krusial untuk menjaga kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam di kawasan tersebut.

b. Migrasi

Kehadiran PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) telah menjadi faktor pendorong utama terjadinya arus migrasi masuk (in-migration) ke Kabupaten Morowali Utara. Aktivitas industri pertambangan yang berkembang pesat menimbulkan kebutuhan

tenaga kerja yang besar, sehingga banyak pencari kerja dari berbagai provinsi dan kabupaten lain tertarik untuk datang dan menetap di wilayah sekitar tambang. Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Petasia merupakan dua wilayah yang paling terdampak dari fenomena migrasi ini. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Petasia Timur meningkat dari 16.428 jiwa pada tahun 2020 menjadi 17.510 jiwa pada tahun 2023, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,92%. Sementara itu, Kecamatan Petasia naik dari 17.997 jiwa pada 2020 menjadi 19.180 jiwa pada 2023, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,09%. Kenaikan tersebut menunjukkan besarnya arus migrasi masuk yang dipengaruhi oleh kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang terbuka luas akibat kehadiran PT GNI. Berdasarkan data BPS, lima provinsi asal migran seumur hidup yang menetap di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 didominasi oleh Sulawesi Selatan dengan jumlah 14.763 jiwa, diikuti Jawa Timur (2.574 jiwa), Jawa Tengah (2.030 jiwa), Bali (1.504 jiwa), dan Nusa Tenggara Timur (1.147 jiwa). Hal ini mengindikasikan mobilitas tenaga kerja lintas provinsi yang cukup tinggi dan beragam, menjadikan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pertumbuhan baru yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai wilayah. Migrasi masuk ini tidak hanya memengaruhi demografi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan kultural. Pendatang yang berasal dari berbagai daerah membawa beragam adat, budaya, dan pola sosial yang berpotensi memperkaya sekaligus menantang kohesi sosial masyarakat lokal. Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan perumahan, layanan publik, dan fasilitas umum akibat migrasi juga menuntut perencanaan tata ruang yang adaptif dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Dalam Menangani Permasalahan Sosial Terutama Terkait Konflik Yang Terjadi di PT.Gunbuster Nickel Industry

Kehadiran industri pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara, seperti PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), membawa dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan tambang ini juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks, khususnya terkait hubungan industrial dan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik-konflik yang terjadi di PT GNI mencerminkan dinamika ketegangan sosial yang sering muncul di kawasan industri besar, di mana kepentingan ekonomi dan hak-hak pekerja saling bertabrakan. Salah satu konflik utama yang terjadi adalah terkait tuntutan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Insiden kecelakaan kerja di smelter 2 yang mengakibatkan dua pekerja meninggal dunia telah membuka kembali isu standar keselamatan yang dianggap belum memadai. Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI mengajukan sejumlah tuntutan penting kepada manajemen perusahaan, termasuk perbaikan prosedur keselamatan kerja dan penyediaan alat pelindung diri yang memadai. Tuntutan tersebut merupakan refleksi keprihatinan pekerja terhadap kondisi kerja yang berisiko dan perlunya perhatian serius dari pihak perusahaan demi menjamin keselamatan serta kesejahteraan para pekerja. Selain itu, ketegangan antar kelompok pekerja juga meningkat hingga berujung bentrokan fisik yang tragis, menewaskan dua orang, satu pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing. Kejadian tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas perusahaan dan memicu keresahan sosial yang meluas. Konflik internal ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam hubungan industrial serta ketegangan antar kelompok yang berbeda latar belakang, yang dapat memperburuk situasi apabila tidak segera ditangani secara efektif. Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengambil peran strategis dalam meredam konflik dan mencari solusi damai. Pemerintah daerah secara tegas mengutuk tindakan anarkis yang merusak ketertiban dan stabilitas sosial, dan menyerukan agar

penyelesaian dilakukan melalui jalur dialog dan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah berinisiatif memfasilitasi mediasi antara manajemen perusahaan dengan perwakilan pekerja sebagai langkah konkret untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat memenuhi hak-hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Pembentukan forum komunikasi berkelanjutan juga menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memperhatikan situasi ini dengan serius. Pernyataan dari Menkopohukum menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja, baik lokal maupun asing, serta menuntut agar perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Pengawasan dan regulasi diperkuat sebagai upaya preventif agar iklim hubungan industrial di kawasan industri besar tetap kondusif. Dari sisi keamanan, aparat kepolisian dikerahkan untuk mengendalikan situasi pascakonflik, menjaga fasilitas vital perusahaan, serta memastikan proses hukum berjalan terhadap para pelaku kekerasan dan perusakan. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan menciptakan efek jera sekaligus menjaga iklim investasi dan stabilitas sosial di daerah. Pendekatan hukum tersebut diimbangi dengan pendekatan humanis guna menghindari potensi eskalasi sosial yang lebih buruk. Secara keseluruhan, konflik yang terjadi di PT GNI menjadi refleksi kompleksitas interaksi sosial dalam industri pertambangan besar. Penanganan konflik yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak pekerja, serta stabilitas sosial demi kemajuan berkelanjutan di Kabupaten Morowali Utara.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa kehadiran PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara membawa dampak multifaset terhadap masyarakat dan struktur sosial-ekonomi lokal. Dampak positif utamanya adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang sejalan dengan temuan Betancur-Corredor et al. (2018) di Kolombia dan Hajkowicz et al. (2011) di Australia yang menegaskan bahwa industri pertambangan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Namun, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Mwakesi et al. (2020) di Kenya, kontribusi ekonomi ini sering kali tidak merata dan justru menimbulkan ketimpangan sosial, sebuah kondisi yang juga tercermin dalam konteks PT GNI, di mana terjadi ketimpangan antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal. Lebih jauh, temuan penelitian ini menyoroti konflik sosial yang terjadi di lingkungan kerja, yang tidak hanya bersumber dari perbedaan kepentingan operasional, tetapi juga menyentuh isu budaya kerja, dominasi kebijakan perusahaan, dan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini selaras dengan pandangan Esteves et al. (2017) yang menekankan pentingnya penilaian dampak sosial dalam proyek tambang, serta Horowitz et al. (2018) yang menyarankan pendekatan yang lebih peka terhadap nilai-nilai kultural dan sejarah lokal dalam proyek ekstraktif. Ketegangan dan resistensi dari pekerja lokal di PT GNI menunjukkan adanya disempowerment sosial, sebuah gejala yang sebelumnya juga ditemukan oleh Scheyvens dan Lagisa (1998) dalam studi tentang perempuan di wilayah pertambangan Pasifik. Insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada Desember 2022 memperkuat temuan mengenai rendahnya jaminan keselamatan kerja di lingkungan PT GNI. Hal ini memperlihatkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi aspek keberlanjutan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kerangka indikator pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Azapagic (2004). Ketidakpercayaan pekerja terhadap komitmen perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja juga menguatkan pentingnya social license to operate yang dibahas oleh Owen dan Kemp (2013) serta Prno dan Slocumbe (2012), yaitu legitimasi sosial yang diperoleh perusahaan dari komunitas lokal, bukan sekadar izin formal dari negara. Selanjutnya, temuan ini menggarisbawahi kegagalan komunikasi antara pihak manajemen dan pekerja, serta lemahnya

sistem negosiasi dan kanal aspirasi. Kondisi ini membuat konflik kerap berujung pada aksi anarkis. Ketiadaan mekanisme resolusi konflik yang transparan dan inklusif, sebagaimana dicontohkan dalam kasus PT GNI, menjadi bukti lemahnya tata kelola relasi kerja, yang dalam perspektif Frederiksen (2018, 2019) dapat menciptakan ketegangan sosial-politik dalam konteks negara berkembang. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan CSR yang berorientasi pada keadilan dan partisipasi, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks peran negara, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga negara seperti dinas ketenagakerjaan, lembaga pengawasan, hingga kepolisian masih bersifat reaktif dan lemah. Temuan ini sejalan dengan kajian Smith et al. (2012) tentang tantangan representasi komunitas dalam sistem transparansi industri ekstraktif, serta Petkova et al. (2009) yang menekankan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya regulasi negara dapat memperparah konflik sosial di wilayah tambang. Tanpa negara yang aktif dan protektif, hak-hak dasar pekerja seperti keselamatan kerja, kesejahteraan, dan kebebasan berserikat, cenderung terabaikan. Akhirnya, penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pengelolaan industri ekstraktif seperti pertambangan harus menggunakan pendekatan multidimensi dan holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan. Pendekatan ini didukung oleh temuan Di Noi dan Ciroth (2018) yang menyoroti pentingnya perhatian terhadap hotspots keberlanjutan dalam operasi tambang, serta Kossoff et al. (2014) dan Dudka dan Adriano (1997) yang menegaskan bahwa dampak lingkungan dan sosial harus dikelola dengan metode yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, temuan utama dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi memperkaya wacana global terkait risiko dan tantangan dalam industri pertambangan, serta pentingnya tata kelola yang inklusif dan berkeadilan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lokal.

3.4. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain konflik internal antara pekerja dan manajemen, penelitian ini juga menyoroti adanya provokasi eksternal yang memperburuk situasi sosial di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI). Ketegangan yang muncul tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal dan kepentingan beragam aktor eksternal yang memanfaatkan konflik sebagai alat untuk memperkuat posisi politik atau ekonomi mereka. Fenomena ini menambah lapisan kompleksitas dalam penyelesaian konflik, sebagaimana dijelaskan oleh Gamu, Le Billon, dan Spiegel (2015), yang mengemukakan bahwa konflik industri ekstraktif kerap dipengaruhi oleh jaringan kepentingan politik dan ekonomi di luar arena perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang ketat memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mengurangi risiko kekerasan, namun pendekatan tersebut harus diimbangi dengan strategi humanis yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali kepercayaan masyarakat, sebagaimana disarankan oleh Sovacool et al. (2020) dalam konteks tata kelola industri yang berkelanjutan. Salah satu aspek yang sangat penting namun belum optimal di PT GNI adalah penerapan forum komunikasi berkelanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan forum komunikasi yang efektif dapat menjadi ruang strategis untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan pekerja serta memfasilitasi solusi kolaboratif. Hal ini sejalan dengan temuan Horowitz et al. (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan manajemen konflik industri pertambangan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dan serikat pekerja dalam membangun mekanisme komunikasi yang transparan dan inklusif. Forum komunikasi ini tidak hanya mencegah eskalasi konflik, tetapi juga mendukung penguatan hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, isu kesejahteraan pekerja menjadi elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Penelitian ini mengidentifikasi kegagalan PT GNI dalam menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai dan menjamin keselamatan kerja sebagai penyebab utama keresahan pekerja serta berpotensi memicu konflik

berkepanjangan. Hal ini konsisten dengan temuan Hilson (2012) yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar pekerja dalam menjaga stabilitas sosial dan reputasi perusahaan. Kekurangan dalam aspek kesejahteraan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas dan keberlanjutan operasi perusahaan, sebagaimana ditegaskan oleh Mardonova dan Han (2023). Dengan mengintegrasikan dimensi politik eksternal, mekanisme komunikasi internal yang belum maksimal, dan masalah kesejahteraan pekerja, penelitian ini memperlihatkan bahwa penanganan konflik di PT GNI memerlukan pendekatan multidimensi yang holistik. Pendekatan tersebut harus mengedepankan dialog terbuka, transparansi kebijakan, serta penguatan kapasitas institusional baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat masyarakat dan pemerintah lokal. Pendekatan ini akan mendukung terciptanya iklim kerja yang aman, adil, dan kondusif untuk pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkecil risiko konflik yang bersifat destruktif dan berkepanjangan.

IV KESIMPULAN

Dari seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik di PT GNI merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan distribusi manfaat ekonomi di sektor pertambangan. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat material, melainkan juga menyangkut aspek psikologis dan sosial pekerja yang merasa terabaikan dan tidak aman dalam menjalankan tugasnya. Upaya mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat dalam pengawasan dan penegakan hukum terbukti penting dalam menahan eskalasi konflik dan mengembalikan stabilitas sosial. Namun demikian, mediasi dan penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan langkah-langkah preventif yang sistematis, seperti pembaruan kebijakan keselamatan kerja, pelatihan pekerja, serta pengembangan dialog sosial yang konstruktif. Penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga mediator dan fasilitator dalam menjembatani kepentingan perusahaan dan pekerja. Keberhasilan sinergi antara berbagai pihak akan menentukan keberlangsungan operasi industri pertambangan serta keberlanjutan pembangunan daerah secara lebih luas. Kesimpulan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur hubungan industrial dan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks industri ekstraktif yang rentan terhadap konflik sosial.

Keterbatasan Penelitian: evaluasi dan referensi untuk studi lanjutan. Pertama, penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari laporan media massa dan dokumen resmi, sehingga potensi bias dalam penyajian fakta dan interpretasi informasi sangat mungkin terjadi. Ketiadaan data primer dari wawancara langsung dengan para pekerja, manajemen perusahaan, maupun masyarakat lokal menyebabkan kurangnya kedalaman pemahaman terhadap perspektif para aktor utama yang terlibat dalam konflik. Kedua, penelitian ini fokus pada aspek konflik dan respons pemerintah tanpa mengeksplorasi secara mendalam dampak jangka panjang konflik terhadap sosial ekonomi masyarakat, seperti perubahan pola hidup, ketahanan sosial, maupun psikologis masyarakat terdampak. Ketiga, penelitian belum membahas aspek gender dan keragaman budaya pekerja secara spesifik yang mungkin memberikan nuansa berbeda dalam dinamika konflik. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian mendalam yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara komprehensif, serta pendekatan interdisipliner yang dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam analisis konflik industri pertambangan.

Arah Masa Depan Penelitian: Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, penelitian masa depan disarankan untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif dengan melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan utama, seperti pekerja lokal,

tenaga kerja asing, manajemen perusahaan, serta masyarakat sekitar. Studi kualitatif melalui wawancara mendalam dan focus group discussion dapat menggali secara rinci persepsi, harapan, dan pengalaman mereka dalam menghadapi konflik serta proses penyelesaiannya. Selain itu, penelitian masa depan perlu mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme mediasi dan forum komunikasi yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan dialog sosial. Topik lain yang menjanjikan adalah penelitian terkait peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan keselamatan kerja dan pengelolaan hubungan industrial. Misalnya, penggunaan sistem monitoring keselamatan otomatis, pelatihan berbasis virtual reality, atau platform komunikasi digital yang dapat mempercepat penyampaian keluhan dan resolusi masalah. Penelitian juga perlu mengembangkan model hubungan industrial yang adaptif terhadap keberagaman tenaga kerja dan dinamika sosial lokal, serta memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, arah penelitian masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan solusi praktis dalam mengelola industri pertambangan yang berkelanjutan dan harmonis dengan masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama selama pelaksanaan penelitian ini. Baik kepada pemerintah daerah, pihak perusahaan, masyarakat, maupun semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi dengan penuh keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azapagic, A. (2004). Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry. *Journal of Cleaner Production*, 12(6), 639–662. [https://doi.org/10.1016/S0959-6526\(03\)00075-1](https://doi.org/10.1016/S0959-6526(03)00075-1)
- Betancur-Corredor, B., Loaiza-Usuga, J. C., Denich, M., & Borgemeister, C. (2018). Gold mining as a potential driver of development in Colombia: Challenges and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 199, 538–553. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.142>
- Di Noi, C., & Ciroth, A. (2018). Environmental and social pressures in mining: Results from a sustainability hotspots screening. *Resources*, 7(4), 80. <https://doi.org/10.3390/resources7040080>
- Dudka, S., & Adriano, D. C. (1997). Environmental impacts of metal ore mining and processing: A review. *Journal of Environmental Quality*, 26(3), 590–602. <https://doi.org/10.2134/jeq1997.00472425002600030003x>
- Esteves, A. M., Factor, G., Vancly, F., Götzmann, N., & Moreira, S. (2017). Adapting social impact assessment to address a project's human rights impacts and risks. *Environmental Impact Assessment Review*, 67, 73–87. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.07.001>
- Frederiksen, T. (2018). Corporate social responsibility, risk and development in the mining industry. *Resources Policy*, 59, 495–505. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.004>
- Frederiksen, T. (2019). Political settlements, the mining industry and corporate social responsibility in developing countries. *The Extractive Industries and Society*, 6(1), 162–170. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.07.007>
- Gamu, J., Le Billon, P., & Spiegel, S. (2015). Extractive industries and poverty: A review of recent findings and linkage mechanisms. *The Extractive Industries and Society*, 2(1), 162–176. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.11.001>

- Hajkowicz, S. A., Heyenga, S., & Moffat, K. (2011). The relationship between mining and socio-economic well being in Australia's regions. *Resources Policy*, 36(1), 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.08.007>
- Hilson, G. (2012). Corporate social responsibility in the extractive industries: Experiences from developing countries. *Resources Policy*, 37(2), 131–137. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.01.002>
- Horowitz, L. S., Keeling, A., Lévesque, F., Rodon, T., Schott, S., & Thériault, S. (2018). Indigenous peoples' relationships to large-scale mining in post/colonial contexts: Toward multidisciplinary comparative perspectives. *The Extractive Industries and Society*, 5(3), 404–414. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.05.004>
- Kaligis, D. R., Syafri, W., & Achmad, M. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) di Kabupaten Pesawaran. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 7(2), 20–33. <https://doi.org/10.25299/wedana.v7i2.8872>
- Kossoff, D., Dubbin, W. E., Alfredsson, M., Edwards, S. J., Macklin, M. G., & Hudson-Edwards, K. A. (2014). Mine tailings dams: Characteristics, failure, environmental impacts, and remediation. *Applied Geochemistry*, 51, 229–245. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2014.09.010>
- Liu, Y., Li, H., Huang, S., An, H., Santagata, R., & Ulgiati, S. (2020). Environmental and economic-related impact assessment of iron and steel production: A call for shared responsibility in global trade. *Journal of Cleaner Production*, 269, 122239. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122239>
- Mardonova, M., & Han, Y.-S. (2023). Environmental, hydrological, and social impacts of coal and nonmetal minerals mining operations. *Journal of Environmental Management*, 332, 117387. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117387>
- Mestanza-Ramón, C., Ordoñez-Alcivar, R., Arguello-Guadalupe, C., Carrera-Silva, K., D'Orio, G., & Straface, S. (2022). History, socioeconomic problems and environmental impacts of gold mining in the Andean region of Ecuador. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1190. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031190>
- Mwakesi, I., Wahome, R., & Ichang'i, D. (2020). Mining impact on communities' livelihoods: A case study of Taita Taveta County, Kenya. *AIMS Environmental Science*, 7(3), 286–301. <https://doi.org/10.3934/environsci.2020018>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Owen, J. R., & Kemp, D. (2013). Social licence and mining: A critical perspective. *Resources Policy*, 38(1), 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.016>
- Petkova, V., Lockie, S., Rolfe, J., & Ivanova, G. (2009). Mining developments and social impacts on communities: Bowen Basin case studies. *Rural Society*, 19(3), 211–228. <https://doi.org/10.5172/rsj.19.3.211>
- Prno, J., & Scott Slocombe, D. (2012). Exploring the origins of 'social license to operate' in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. *Resources Policy*, 37(3), 346–357. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.04.002>
- Rudke, A. P., Sikora de Souza, V. A., Santos, A. M. dos, Freitas Xavier, A. C., Rotunno Filho, O. C., & Martins, J. A. (2020). Impact of mining activities on areas of environmental protection in the southwest of the Amazon: A GIS- and remote sensing-based assessment.

Journal of Environmental Management, 263, 110392.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110392>

- Scheyvens, R., & Lagisa, L. (1998). Women, disempowerment and resistance: An analysis of logging and mining activities in the Pacific. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 19(1), 51–70. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.1998.tb00250.x>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik – legalistik – empirik – inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Smith, S. M., Shepherd, D. D., & Dorward, P. T. (2012). Perspectives on community representation within the Extractive Industries Transparency Initiative: Experiences from south-east Madagascar. *Resources Policy*, 37(2), 241–250. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2011.01.001>
- Sovacool, B. K., Hess, D. J., Cantoni, R., et al. (2020). *Sociotechnical agendas: Reviewing future directions for energy and climate research*. *Energy Research & Social Science*, 70, 101617. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101617>
- Suratmo, F. G. (2021). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. UGM Press.

